

LEGAL OPINION

**IDENTIFIKASI PENATAAN PERATURAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN**

Subbagian Analisa dan Bantuan Hukum

Biro Hukum, Organisasi dan Humas

Semester 2 Tahun 2015

Identifikasi Penataan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

1. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan disusun sebagai wujud berlakunya suatu norma atau kebijakan dalam suatu instansi pemerintah. Sesuai dengan asas pembentukannya, suatu peraturan harus tidak saling bertentangan dengan peraturan lainnya. Karena potensi ketidakharmonisan peraturan sangat tinggi sehingga diperlukan keselarasan dan keserasian dalam pembentukannya.

Dalam penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang diprakarsai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penataan peraturan perundang-undangan dalam suatu instansi menjadi salah satu kriteria penilaian. Peraturan perundang-undangan harus dikelola secara berkala dalam rangka peningkatan kinerja dan penyempurnaan kebijakan.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

3. Peraturan Kepala BSN

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
PERATURAN 2010				
1	135/PER/BSN/12/2010	Sistem Standardisasi Nasional	20 Desember 2010	Sesuai dengan UU 20/2014, acuan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian berpedoman pada Kebijakan Nasional SPK yang ditetapkan oleh Menteri yang mengoordinasikan, sehingga Peraturan Kepala BSN Nomor 135/PER/BSN/12/2010 tentang SSN ini perlu dikaji kembali.
PERATURAN 2011				
1	1 Tahun 2011	Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib	1 Februari 2011	Istilah dan definisi yang digunakan dalam Peraturan Kepala ini harus diperbarui sesuai dengan UU 20/2014.
2	2 Tahun 2011	Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 309 Tahun 2011 tentang Panduan Keberterimaan Regulasi Teknis, Standar dan Prosedur Penilaian Kesesuaian Untuk Produk Peralatan Kelistrikan dan	1 Februari 2011	Istilah dan definisi yang digunakan dalam Peraturan Kepala ini harus diperbarui sesuai dengan UU 20/2014.

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
		Elektronika Dalam Rangka Persetujuan ASEAN Mengenai Harmonisasi Tata Cara Pengaturan Peralatan Listrik dan Elektronika		
3	3 Tahun 2011	Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014	7 Februari 2011	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014. ➤ Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2015-2019.
4	4 Tahun 2011	Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 965/BSN-I/HK.35/05/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional	28 Februari 2011	Peraturan Kepala ini masih tetap berlaku, sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Presiden tentang Badan Standardisasi Nasional (amanat dari UU 20/2014).

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
5	5 Tahun 2011	Unit Layanan Pengadaan Badan Standardisasi Nasional	18 Maret 2011	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perpres 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah 2 (dua) kali dilakukan perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga substansi perlu dikaji kembali. ➤ Perlu dikaji kembali mengenai pejabat yang berwenang mengangkat kepala ULP. ➤ Pasal 4 Peraturan Kepala ini menyatakan bahwa ULP didukung oleh sekretariat yang <i>ex officio</i> dilakukan oleh Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan.
6	6 Tahun 2011	Manajemen Teknis Penerapan Standar Badan Standardisasi Nasional	5 April 2011	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fungsi koordinasi Peraturan Kepala ini harus ditinjau kembali, terutama berkaitan dengan Komite Nasional Standar untuk Satuan Ukuran (KSNSU). ➤ Sesuai dengan Pasal 43 UU 20/2014 bahwa pengelolaan standar nasional satuan ukuran dilakukan oleh BSN.
7	7 Tahun 2011	Standar Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Standardisasi Nasional	11 Juli 2011	perlu dilakukan <i>updating</i> terhadap dasar hukum Peraturan Kepala ini jika sudah ada yang mengalami perubahan.
8	8 Tahun 2011	Pedoman Penatausahaan Barang	11 Juli 2011	perlu dilakukan <i>updating</i> terhadap dasar hukum Peraturan

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
		Milik Negara Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional		Kepala ini jika sudah ada yang mengalami perubahan.
9	9 Tahun 2011	Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	11 Juli 2011	perlu dilakukan <i>updating</i> terhadap dasar hukum Peraturan Kepala ini jika sudah ada yang mengalami perubahan.
10	11 Tahun 2011	Pedoman Layanan Informasi Publik Badan Standardisasi Nasional	4 Agustus 2011	Peraturan Kepala ini masih selaras, kecuali jika telah dilakukan reorganisasi BSN, karena berkaitan dengan unit kerja pengelola Layanan Informasi Publik dengan sekretariat yang <i>ex officio</i> dilakukan oleh Bagian Humas.
11	12 Tahun 2011	Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan Standardisasi Nasional	19 September 2011	Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran.
12	13 Tahun 2011	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	10 November 2011	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
PERATURAN 2012				

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
1	1 Tahun 2012	Pencabutan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 71/KEP/BSN/2/2006 Tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 306-2006: Penilaian Kesesuaian-Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Produk Terhadap SNI	22 Maret 2012	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, ketentuan penggunaan Tanda SNI seharusnya diatur oleh Kepala BSN.
2	2 Tahun 2012	Pencabutan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 48/PERS/BSN/6/2009 Tentang Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 308:2009 Penilaian Kesesuaian-Ketentuan Umum Pengguna Tanda Kesesuaian	22 Maret 2012	OK
3	3 Tahun 2012	Pedoman Standardisasi Nasional Tentang Notifikasi dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan <i>Agreement on Technical Barriers to Trade-World Trade Organization</i>	5 April 2012	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Istilah dan definisi yang digunakan dalam Peraturan Kepala ini harus diperbaharui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. ➤ Notifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
		(TBT-WTO)		2014, masuk dalam substansi Pasal 51 mengenai kewajiban internasional yang akan dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
4	4 Tahun 2012	Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Serta Pelaporan Kinerja Pada Badan Standardisasi Nasional	26 Maret 2012	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
5	5 Tahun 2012	Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2012 tentang Standardisasi dan Kegiatan yang Terkait-Istilah Umum	1 Mei 2012	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Definisi dan tujuan standardisasi yang digunakan dalam Peraturan Kepala ini harus diperbaharui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. ➤ Perlu dilakukan Perubahan Peraturan Kepala untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.
6	6 Tahun 2012	Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2012 tentang Adopsi Standar <i>American Society for Testing and Material</i> Menjadi Standar Nasional Indonesia	1 Mei 2012	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Definisi yang digunakan dalam Peraturan Kepala ini harus diperbaharui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. ➤ Perlu dilakukan review, apakah metode adopsi dalam Peraturan Kepala ini masih sesuai atau telah mengalami perubahan (lihat update dari <i>Agreement</i> antara BSN dan

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
				ASTM).
PERATURAN 2013				
1	1 Tahun 2013	Pencabutan 24 (Dua Puluh Empat) Pedoman Badan Standardisasi Nasional	30 Januari 2013	OK
2	2 Tahun 2013	Pencabutan Pedoman Standardisasi Nasional (PBSN) 1001-1999: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP)	30 Januari 2013	OK
3	3 Tahun 2013	Pencabutan Pedoman Standardisasi Nasional (PBSN) 1002-1999: Kriteria Auditor Akreditasi LSSHACCP	30 Januari 2013	OK
4	4 Tahun 2013	Pencabutan Pedoman Standardisasi Nasional (PBSN) 1003-1999:	30 Januari 2013	OK

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
		Kriteria Auditor Sertifikasi LSSHACCP		
5	5 Tahun 2013	Pencabutan Pedoman Standardisasi Nasional (PBSN) 701-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	30 Januari 2013	OK
6	6 Tahun 2013	Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional Tahun 2010-2014	4 Februari 2013	OK
7	07/KEP/BSN/2/2013	Indikator Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional	4 Februari 2013	IKU BSN harus dirubah sesuai dengan tugas BSN sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.
8	8 Tahun 2013	Pedoman Keprotokolan Badan Standardisasi Nasional	15 Februari 2013	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
9	9 Tahun 2013	Pedoman Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Badan Standardisasi Nasional	24 Mei 2013	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan.
10	10 Tahun 2013	Hari Kerja dan Jam Kerja Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	28 Juni 2013	Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 1 Tahun 2014.
11	11 Tahun 2013	Nama, Kelas dan Nilai Jabatan Di Badan Standardisasi Nasional	28 Juni 2013	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
12	12 Tahun 2013	Komite Nasional Indonesia Untuk <i>International Electrotechnical Commision</i>	28 Juni 2013	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
13	14 Tahun 2013	Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	17 Desember 2013	Peraturan Kepala ini sudah dirubah dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 1 Tahun 2014.
14	15 Tahun 2013	Kode Etik Pegawai Badan Standardisasi Nasional	19 Desember 2013	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
15	16 Tahun 2013	<i>Designating Body</i> Dalam Rangka Pelaksanaan <i>Agreement on The</i>	30 Desember 2013	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan, kecuali jika BSN sudah dilakukan reorganisasi maka

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
		<i>ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime</i>		Peraturan Kepala ini perlu ditinjau kembali terutama mengenai unit kerja yang bertugas sebagai sekretariat <i>Designating Body</i> .
PERATURAN 2014				
1	1 Tahun 2014	Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	2 Januari 2014	OK
2	2 Tahun 2014	Strategi Standardisasi Nasional Tahun 2015-2025	26 Mei 2014	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Strategi Standardisasi Nasional perlu dilakukan perubahan setelah adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. ➤ Strategi Standardisasi Nasional harus disusun berdasarkan tugas dan tanggung jawab BSN seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014.
3	3 Tahun 2014	Pemberian dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	29 September 2014	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
4	3A Tahun 2014	Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	29 September 2014	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
5	4 Tahun 2014	Sistem Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	2 Desember 2014	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
6	5 Tahun 2014	Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	2 Desember 2014	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
7	6 Tahun 2014	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	2 Desember 2014	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
8	7 Tahun 2014	Standar Pelayanan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian	29 Desember 2014	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
9	8 Tahun 2014	Standar Pelayanan <i>Issuer Identification Number</i>	29 Desember 2014	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
10	9 Tahun 2014	Standar Pelayanan Dokumentasi	29 Desember	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
		dan Informasi Standardisasi	2014	
11	10 Tahun 2014	Standar Pelayanan Pelatihan Standardisasi	29 Desember 2014	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
PERATURAN 2015				
1	1 Tahun 2015	Pedoman Penangan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	27 Januari 2015	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
2	2 Tahun 2015	Pedoman Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	12 Februari 2015	Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
3	2A Tahun 2015	CODEX Indonesia	12 Februari 2015	Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Codex Indonesia.
4	3 Tahun 2015	Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Badan Standardisasi Nasional	31 Maret 2015	Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Badan Standardisasi Nasional
5	4 Tahun 2015	Rencana Strategis Badan	30 April 2015	Dasar pelaksanaan perencanaan kegiatan Badan

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
		Standardisasi Nasional 2015-2019		Standardisasi Nasional yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka (RPJM)
6	4A Tahun 2015	Pencabutan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pelatihan	30 April 2015	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pelatihan tidak selaras dan membutuhkan pengaturan yang lebih komprehensif
7	5 Tahun 2015	Standar Pelayanan Pelatihan Standardisasi	1 Juni 2015	Mengatur dan menyempurnakan Standar Pelayanan Pelatihan
8	6 Tahun 2015	Pedoman Penelitian dan Pengembangan Standardisasi	31 Juli 2015	Memberikan pengaturan mengenai kebijakan Penelitian dan Pengembangan Standardisasi
9	7 Tahun 2015	Skema Sertifikasi Pasar Rakyat	25 September 2015	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan pengaturan mengenai skema sertifikasi pasar rakyat ➤ Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
10	8 Tahun 2015	Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia	4 Desember 2015	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014
11	9 Tahun 2015	Pedoman Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penomoran	4 Desember 2015	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

NOMOR	NOMOR PERATURAN	JUDUL PERATURAN	TANGGAL PENETAPAN	KETERANGAN
		Standar Nasional Indonesia		
12	10 Tahun 2015	Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	30 Desember 2015	Masih selaras dengan peraturan perundang-undangan
13	11 Tahun 2015	Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan Standardisasi Nasional	31 Desember 2015	Pembaruan atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Badan Standardisasi Nasional

Diketahui oleh

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas

Ir. Budi Rahardjo, M.M.

